

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Jumat 10 Januari 2025
Wilayah	Kota Makassar



THR Guru Akan Dibayarkan

THR Guru Akan Dibayarkan

Silpa Makassar Rp199 M

MAKASSAR, FAJAR — Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Makassar tercatat sebesar Rp199 miliar. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun nilainya hampir sama dengan Silpa tahun 2023. Silpa tersebut terjadi karena beberapa kegiatan tidak terlaksana, ditambah adanya beberapa kewajiban mandatori.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muhammad Dakhlan, memberikan contoh bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) untuk guru tidak dibayarkan pada tahun lalu. Hal ini disebabkan anggaran dari pemerintah pusat baru masuk pada akhir tahun. "Jadi, THR guru baru akan dibayarkan tahun ini. Saya lupa jumlah pastinya," ungkap Dakhlan pada Kamis, 9 Januari. Sementara itu, untuk proyek-proyek, Dakh-

THR Guru Akan Dibayarkan

❖ Lanjutan Halaman... 9

lan menjelaskan bahwa hampir semuanya telah terbayarkan. "Hanya satu atau dua proyek yang belum terbayar karena kendala administrasi yang tidak lengkap, sehingga akan menjadi utang belanja," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, A Zulkifly Nanda, menambahkan bahwa realisasi pendapatan pada tahun 2024 mencapai 83,68 persen, sedangkan realisasi belanja berada di angka 78,51 persen.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan serapan anggaran terendah adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Hal ini disebabkan tertundanya proyek strategis, yaitu revitalisasi Lapangan Karebosi yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp63,5 miliar. "Proyek tersebut sempat mengalami pemutusan kontrak, namun akan tetap dilanjutkan pada tahun ini," jelas Zulkifly, yang juga mantan Camat Ujung Pandang.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyampaikan

rasa syukurnya karena Silpa tidak sebesar yang ia perkirakan. Sebelumnya, Danny, sapaan akrabnya, memperkirakan Silpa Makassar berpotensi mencapai Rp1 triliun.

"Ternyata tidak sebesar itu karena memang program-program yang sebelumnya direncanakan tinggal dilanjutkan pembayarannya. Jadi, tidak menjadi Silpa karena program tersebut hanya perlu mengubah tahunnya saja. Awalnya berpotensi menjadi Silpa, tetapi tidak karena programnya dilanjutkan, sehingga tidak dikategorikan seba-

gai Silpa," jelas Danny usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Makassar di Kantor BPK Sulsel, kemarin.

Ia juga berharap agar semua program atau proyek yang memerlukan proses tender tahun ini dapat dilakukan dengan lebih cepat. "Kita dorong pelaksanaan tender dini karena ada arahan untuk mempercepat semuanya. Namun, kendalanya adalah adanya sistem baru, versi terbaru, yang harus kita ikuti sesuai dengan arahan Bapak Presiden," ungkapnya. (mum/ham)